



LAPORAN SINGKAT

KOMISI VI DPR RI

BIDANG INDUSTRI, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM, BUMN, DAN INVESTASI

Rapat ke	:	17 (<i>tujuh belas</i>)
Tahun Sidang	:	2019-2020
Masa Persidangan	:	IV
Jenis Rapat	:	Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan PT Kereta Api Indonesia (Persero)
Hari, Tanggal	:	Rabu, 8 Juli 2020
Pukul	:	09.00 WIB
Sifat Rapat	:	Terbuka
Pimpinan Rapat	:	Dibuka oleh Faisol Riza, Ketua Komisi VI DPR RI, dilanjutkan oleh Martin Manurung, S.E., M.A, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI
Sekretaris Rapat	:	Dewi Resmini, S.E., M.Si., Kabagset. Komisi VI DPR RI
Tempat	:	Ruang Rapat Komisi VI DPR RI, Gedung Nusantara I Lt. Dasar Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270
A c a r a	:	Pendalaman Terkait Penerima Dana Talangan Tahun Anggaran 2020
Hadir	:	1. dari 53 Anggota Komisi VI DPR RI; 2. Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero), Didiek Hartantyo, beserta jajarannya.

I. PENDAHULUAN

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Ketua Rapat membuka Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI pada pukul 10.26 WIB dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI pada hari Rabu, 8 Juli 2020, dengan acara dan waktu sebagaimana tersebut di atas, dipimpin dan dibuka oleh Ketua Komisi VI DPR RI, Faisol Riza, kemudian dilanjutkan oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Martin Manurung, S.E., M.A.
3. Sehubungan dengan wabah virus Covid-19, maka Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dilakukan secara Fisik dan virtual.

II. KESIMPULAN RAPAT

1. Komisi VI DPR RI dapat menerima penjelasan terkait kebutuhan Dana Talangan Pemerintah kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) Tahun Anggaran 2020 sebesar **Rp3.500.000.000.000,-** (*Tiga Triliun Lima Ratus Miliar Rupiah*) yang digunakan untuk mendanai biaya operasional, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Perawatan sarana perkeretaa0pian sebesar **Rp680.000.000.000,-** (*Enam Ratus Delapan Puluh Miliar Rupiah*)
 - b. Perawatan prasarana termasuk bangunan sebesar **Rp740.000.000.000,-** (*Tujuh Ratus Empat Puluh Miliar Rupiah*)
 - c. Pemenuhan biaya pegawai sebesar **Rp1.250.000.000.000,-** (*Satu Triliun Dua Ratus Lima Puluh Miliar Rupiah*)
 - d. Biaya bahan bakar sebesar **Rp550.000.000.000,-** (*Lima Ratus Lima Puluh Miliar Rupiah*)
 - e. Pendukung operasional lainnya sebesar **Rp280.000.000.000,-** (*Dua Ratus Delapan Puluh Miliar Rupiah*)
2. Komisi VI DPR RI dapat menerima penjelasan PT Kereta Api Indonesia (Persero) terkait usulan Dana Talangan Pemerintah di atas yang diberikan dalam bentuk instrumen *soft loan* dengan bunga rendah yaitu sebesar 2%-3% dan jatuh tempo dalam waktu di atas 7 (tujuh) tahun.
3. Komisi VI DPR RI meminta PT Kereta Api Indonesia (Persero) untuk melakukan renegotiasi dengan pemerintah terkait relaksasi beban IMO (*Infrastructure, Maintenance & Operations*) dan TAC (*Track Access Charge*) agar bisa mengurangi tekanan likuiditas PT Kereta Api Indonesia (Persero).
4. Komisi VI DPR RI akan membahas terkait Dana Talangan Pemerintah ke BUMN Tahun 2020 kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) pada rapat Pleno Komisi VI DPR RI sebagai bahan pengambilan keputusan dalam Rapat Kerja dengan Menteri BUMN.
5. Komisi VI DPR RI meminta PT Kereta Api Indonesia (Persero) untuk memberikan jawaban secara tertulis dalam waktu paling lama 10 (*sepuluh*) hari kerja atas pertanyaan Anggota Komisi VI DPR RI.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 12.18 WIB.

Jakarta, 8 Juli 2020
PIMPINAN KOMISI VI DPR RI
KETUA RAPAT,

TTD.

MARTIN MANURUNG, S.E., M.A.
A-352